



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN
MS I Tahun Sidang 2022-2023
(31 Agustus – 14 September 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

21/9/22

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI II	4
D. FUNGSI LEGISLASI	4
E. FUNGSI ANGGARAN	6
F. FUNGSI PENGAWASAN	6
KOMISI III	15
A. FUNGSI LEGISLASI	15
B. FUNGSI ANGGARAN	16
C. FUNGSI PENGAWASAN	19
KOMISI IV	20
A. FUNGSI LEGISLASI	20
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	24

KOMISI V	26
A. FUNGSI LEGISLASI	26
B. FUNGSI ANGGARAN	26
C. FUNGSI PENGAWASAN	30
KOMISI VI	32
A. FUNGSI LEGISLASI	32
B. FUNGSI ANGGARAN	32
C. FUNGSI PENGAWASAN	36
KOMISI VII	38
A. FUNGSI LEGISLASI	38
B. FUNGSI ANGGARAN	38
C. FUNGSI PENGAWASAN	39
KOMISI VIII	43
A. FUNGSI LEGISLASI	43
B. FUNGSI ANGGARAN	44
C. FUNGSI PENGAWASAN	46

KOMISI IX	47
A. FUNGSI LEGISLASI	47
B. FUNGSI ANGGARAN	47
C. FUNGSI PENGAWASAN	49
KOMISI X	51
A. FUNGSI LEGISLASI	51
B. FUNGSI ANGGARAN	55
C. FUNGSI PENGAWASAN	59
BADAN LEGISLASI	62
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	64
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	74
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	75
BADAN ANGGARAN	78
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	86

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	Pada tanggal 7 September 2022, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.	Menunggu penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II untuk Pengambilan Keputusan untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.
2.	RUU tentang Pengesahan <i>International Convention for The Protection of All Persons From Enforced Disappearance</i> (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).	Dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pengesahan <i>International Convention for The Protection of All Persons From Enforced Disappearance</i> (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa), Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi/LSM, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Marzuki Darusman;2. Bivitri Susanti;3. Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS); dan4. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemlu, Kemkominfo, Kemhan, TNI, BIN, BSSN, Bakamla, LPP RRI, LPP TVRI, Lemhannas, Wantannas, KPI Pusat, KI Pusat, Dewan Pers.	Rapat Kerja dan RDP Komisi I DPR RI.	Pembahasan RKA (Pagu Anggaran) Mitra Kerja Komisi I DPR RI TA 2023.	Hasil Pembahasan RKA (Pagu Anggaran) Mitra Kerja Komisi I DPR RI TA 2023 telah disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK SUBSTANSI	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemlu, Kemkominfo, Kemhan, TNI, BIN, BSSN, Bakamla, LPP RRI, LPP TVRI, Lemhannas, Wantannas, KPI Pusat, KI Pusat, Dewan Pers.	Rapat Kerja dan RDP Komisi I DPR RI.	Pembahasan isu-isu actual.	
2.	BSSN	Kunjungan Kerja Spesifik.	Mengetahui monitoring program penanganan siber menghadapi Pilpres/Pileg 2024.	
3.	Lanal Banten		Mengetahui peran Lanal Banten dalam menanggulangi kejahatan non tradisional.	
4.	TNI AU		Mengetahui upaya meningkatkan kesejahteraan Prajurit bidang kesehatan di RSAU Salamun Bandung.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK SUBSTANSI	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Kemkominfo dan Kemlu	RDP Panja Pengawasan G20.	<p>Kemkominfo: Upaya strategis Kemkominfo dalam Presidensi G20 untuk mewujudkan transformasi digital dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inovatif, adaptif, dan inklusif.</p> <p>Kemlu: 1. Peta geopolitik dan geoekonomi RI di G20 2. Pelaksanaan diplomasi RI di G20: a. Pemulihan ekonomi global; b. Ketahanan pangan dan energi; c. System kesehatan global; d. Isu-isu aktual dalam <i>financial track</i> dan <i>sherpa track</i>.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Di Papua Barat Daya	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan & peninjauan</i>	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Dirjen Polpum Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Fak-Fak, Pimpinan DPR Kabupaten Manokwari, dan Pj. Bupati Tambrauw, dengan agenda audiensi penyampaian aspirasi pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.	Komisi II DPR RI telah mendengarkan audiensi/permasalahan masyarakat dan akan menindaklanjuti pada rapat panja selanjutnya.
2.			Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja	Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah menyepakati beberapa hal, sebagai berikut: 1. Nama Calon Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pembahasan RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya.	berkedudukan di Kota Sorong. 2. Cakupan wilayah Kabupaten/Kota di dalam RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yakni sebagai berikut: 1) Kabupaten Sorong 2) Kabupaten Sorong Selatan 3) Kabupaten Raja Ampat 4) Kabupaten Tambrauw 5) Kabupaten Maybrat; dan 6) Kota Sorong.
3.		3.	Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan, penandatanganan draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan penandatanganan peta wilayah.	Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Seluruh Mitra Komisi II DPR RI	Konsinyering	Komisi II DPR RI dengan seluruh mitra Komisi II DPR RI terkait Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 dan Pembahasan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. 	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan tindak lanjut pasca terbitnya 4 (empat) Undang-Undang tentang Pembentukan provinsi di wilayah Provinsi Papua / Papua	1. Sebagai konsekuensi terhadap terbentuknya 3 (tiga) daerah otonom baru di Provinsi Papua (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan) dan mengantisipasi akan terbentuknya satu daerah otonom baru di Wilayah Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat Daya), Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Barat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.	<p>Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI menyetujui untuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <p>2. Sebelum terbitnya PERPPU sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu di provinsi baru wilayah Papua dilaksanakan oleh KPU RI dan Bawaslu RI sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di provinsi baru wilayah Papua.</p>
2.			Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan	1. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri menyetujui Perubahan ketiga Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>agenda pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu dan Rancangan Peraturan DKPP.</p>	<p>Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.</p> <p>2. Setelah memerhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan DKPP RI, meminta kepada Bawaslu RI untuk menyempurnakan 6 (enam) Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU), untuk selanjutnya akan dibahas pada rapat berikutnya.</p>
3.	Kementerian ATR/BPN RI	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p>	<p>Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda membahas terkait kasus-ka.sus pertanahan.</p>	<p>1. Terhadap capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN RI Tahun Anggaran 2022 per 19 Agustus 2022 sebesar 45,72%, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI untuk meningkatkan realisasi anggaran agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan optimal.</p> <p>2. Komisi II DPR RI mendukung upaya Kementerian ATR/BPN RI merealisasikan target PTSL di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai upaya legalisasi asset yang tidak hanya mengejar target kuantitas namun juga</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>mampu mengantisipasi potensi konflik dan sengketa pertanahan.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI melanjutkan upaya menertibkan internal Kementerian ATR/BPN RI dari praktik mafia tanah dan memberantas oknum – oknum mafia pertanahan.</p> <p>4. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk melakukan evaluasi dan pengukuran ulang terhadap tanah HGU, HGB, dan HPL yang selama ini berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan.</p> <p>5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI bersinergi dengan kementerian terkait lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah, dalam hal menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan akibat kebijakan sektoral Kementerian/Lembaga</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>yang berkaitan dengan penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah.</p> <p>6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk juga memerhatikan masalah-masalah tata ruang yang ada di seluruh Indonesia, dan juga melakukan sosialisasi tata ruang sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.</p> <p>7. Sebagai upaya pembenahan permasalahan pertanahan di Indonesia sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN RI bersepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.</p>
4.			Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Perhimpunan Petani Konawe Selatan, Ketua	Komisi II DPR RI telah mendengarkan audiensi/permasalahan masyarakat dan akan menindaklanjuti pada rapat dengan kementerian terkait.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Paguyuban Masyarakat Citayam Bersatu, Masyarakat Veteran Pejuang Medan, Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah Way Dadi (Way Dadi Baru Bandar Lampung), Ketua ADKASI, Masyarakat Korban Tanah PT. KAI Kelurahan Pasir Gintung Bandar Lampung, Pattuhan Munthe Partibi Lama, dan Agus Widjajanto & Partners, dengan agenda RDPU/Audiensi terkait masalah pertanahan	
5.	Kementerian PAN RB, BKN, dll.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. 	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Selatan,	Komisi II DPR RI telah mendengarkan audiensi/permasalahan masyarakat dan akan menindaklanjuti pada rapat dengan kementerian terkait.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Lampung, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Barat, Ketua DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia, Ketua Ikatan Honorer Kategori-II (HK-II) Polri, dan Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, dengan agenda menerima aspirasi terkait tenaga honorer.	
6.	Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan	Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua KPU,	Komisi II DPR RI secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu.	dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 3. Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 4. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. 5. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 6. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7.	-	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) terkait tupoksi anggota BPD di berbagai Daerah.	Komisi II DPR RI telah mendengarkan audiensi/permasalahan masyarakat dan akan menindaklanjuti pada rapat dengan kementerian/lembaga terkait.
8.	Kanwil BPN Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik komisi II DPR RI terkait permasalahan HGU ke Kanwil BPN Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.	-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan RUU tentang HAPER)	Kunker	Dalam rangka mendapatkan masukan terkait substansi RUU tentang Haper, Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke 3 daerah dan melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi serta akademisi setempat. Adapun kunjungan tersebut dilaksanakan ke: 1. Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 8 s.d. 10 September 2022; 2. Provinsi Bali, tanggal 9 s.d. 11 September 2022; 3. Provinsi NTT, tanggal 9 s.d. 11 September 2022.	---
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan RUU tentang Narkotika)	---	Pada tanggal 30 Agustus s.d. 14 September 2022, Komisi III DPR RI belum melakukan kegiatan pembahasan RUU tentang Narkotika.	---
3.	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)	---	Pada tanggal 30 Agustus s.d. 14 September 2022, Komisi III DPR RI belum melakukan kegiatan pembahasan KUHP.	RUU <i>Carry Over</i>

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepala BNPT	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 31 Agustus 2022, pkl. 10.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, SE, MIKom.
2.	Ketua LPSK	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 31 Agustus 2022, pkl. 13.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM.
3.	Ketua Komnas HAM RI	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 31 Agustus 2022, pkl. 16.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, SE, MIKom.
4.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	RDP	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 1 September 2022, pkl. 10.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum.
5.	Sekjen Mahkamah Konstitusi RI	RDP	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggarann dan perubahan	1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 1 September 2022, pkl. 13.00 WIB.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			program Tahun Anggaran 2023.	2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum.
6.	Sekjen Komisi Yudisial RI	RDP	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 1 September 2022, pkl. 16.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum.
7.	Menteri Hukum dan HAM RI, dalam hal ini diwakilkan oleh Wamenkumham RI.	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 5 September 2022, pkl. 10.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM.
8.	Kapolri, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakapolri	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 5 September 2022, pkl. 14.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum.
9.	Jaksa Agung RI, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakajagung RI	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 5 September 2022, pkl. 16.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, SE, M.I.Kom.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	Sekjen MPR RI dan Sekjen DPD RI	RDP	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 6 September 2022, pkl. 16.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM.
11.	Ketua KPK RI	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 7 September 2022, pkl. 10.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, MBA.
12.	Kepala PPATK RI	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 7 September 2022, pkl. 14.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Desmond J Mahesa, SH, MH. 3. Raker akan dilanjutkan Kembali pada tanggal 13 September 2022.
13.	Kepala BNN RI	Raker	Pembahasan : 1. RKA K/L Tahun 2023. 2. Usulan tambahan anggaran dan perubahan program Tahun Anggaran 2023.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 7 September 2022, pkl. 16.00 WIB. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM.
14.	Kepala PPATK RI	Raker	Lanjutan dari Raker tanggal 7 September 2022.	1. Raker dilaksanakan secara fisik dan virtual pada tanggal 13 September 2022. 2. Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, MBA..

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan (TAMPAK)	RDPU	Membahas: Pelanggaran kode etik Polri serta dugaan suap dan tindak pidana lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDPU tanggal 30 Agustus 2022 dilaksanakan secara fisik dan virtual 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp H. Desmond Juanedi Mahesa, S.H., M.H.
2.	Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Kunker Spesifik	Kunker pengawasan penegakan hukum terkait kasus Alm. Sarijan dan Kasus Subhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunspek dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 September 2022 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp Ir Pangean Khairul Saleh, MM

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Penyampaian Usulan RUU Prioritas Komisi IV DPR RI Tahun 2023 yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.	Usulan disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI melalui surat Pimpinan Komisi IV DPR RI nomor 153/Kom.IV/DPR RI/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Penyampaian Prolegnas RU Prioritas Tahun 2023.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian (Menteri dan 11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Kerja, membahas: a. Tindak lanjut Rapat tanggal 27 Juni 2022 tentang pembahasan Anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku; b. RKA K/L Tahun 2023 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); c. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; d. Evaluasi kebijakan pangan dalam rangka antisipasi krisis pangan dunia; serta e. Isu-isu aktual lainnya.	
2.	Kementerian Pertanian (11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Dengar Pendapat, membahas: a. Progres Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022; b. Progres Evaluasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2022; c. RKA K/L Tahun 2023; serta d. Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.	
3.	Kementerian Pertanian (Menteri dan 11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Kerja, membahas: a. RKA K/L Tahun 2023; serta b. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.	
4.	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri dan 13 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Kerja, membahas: a. RKA K/L Tahun 2023 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi);	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	b. Badan Restorasi Gambut dan <i>Mangrove</i>		b. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; c. Penyampaian hasil identifikasi subjek hukum perkebunan dan pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau serta tindak lanjutnya; serta d. Isu-isu aktual lainnya.	
5.			Rapat Dengar Pendapat, membahas: a. Progres Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022; b. Progres Evaluasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2022; c. RKA K/L Tahun 2023; serta d. Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.	
6.			Rapat Kerja, membahas: a. RKA K/L Tahun 2023; serta b. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Menteri dan 11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Kerja, membahas: a. RKA K/L Tahun 2023 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); b. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; serta c. Isu-isu aktual lainnya	
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Dengar Pendapat, membahas: a. Progres Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022; b. Progres Evaluasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2022; c. RKA K/L Tahun 2023; serta d. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.	
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Menteri dan 11 Eselon I)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Kerja, membahas: a. RKA K/L Tahun 2023; serta b. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	a. PT Antam Tbk.; b. PT Freeport Indonesia; c. PT Rayon Utama Makmur; d. PT Pasir Prima Coal Indonesia; e. PT Vale Indonesia	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membahas Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan dampak Operasional Perusahaan Tambang dan Industri Tekstil/Rayon.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Kunjungan Kerja Spesifik ke Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, di Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, untuk meninjau dan berdiskusi mengenai Permasalahan Perizinan, Kelangkaan Solar, dan Kebijakan Penangkapan Perikanan Terukur.	
2.			Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk berdiskusi mengenai Mitigasi Risiko Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Sumatera Selatan.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.			Kunjungan Kerja Spesifik ke Eks Areal Kerja Pertambangan Batubara PT. Kedap Sayaaq di Desa Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Penegakan Hukum Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KEMENTERIAN PUPR	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 10.00 - 13.00 Wib secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Cipta Karya; 2. Dirjen Perumahan; 3. Kabalai Prasarana Pemukiman Wilayah seluruh Indonesia (virtual); beserta jajaran.
2.			<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 14.00 - Selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Bina Marga; 2. Dirjen Bina Konstruksi; 3. Kabalai Pelaksanaan Jalan Nasional (virtual); 4. Kabalai BP2JK (virtual) beserta jajaran.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - RAKER RDP dilaksanakan pada tanggal 01 September 2022 pukul 10.00 - 13.00 secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Perhubungan Udara; 2. Dirjen Perhubungan Laut; 3. Kepala unit Penyelenggara Bandar Udara (virtual) 4. Kepala unit Penyelenggara Pelabuhan (virtual) beserta jajaran.
4.	KEMENTERIAN PUPR	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023. - Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 01 September 2022 pukul 14.00 - selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen; 2. Dirjen SDA; 3. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR 4. Kabalai Wilayah Sungai (virtual) beserta jajaran.
5.	KEMENTERIAN DESA PDT dan TRANSMIGRASI	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program 	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 05 September 2022 pukul 10.00 - Selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023 - Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	1. Sekjen; 2. Irjen; 3. Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT; 4. Kepala BPDI Desa DTT; beserta jajarannya.
6.			- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023.	- RDP dilaksanakan pada tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 - Selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh 1. Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan; 2. Dirjen PEDIDDT dan Transmigrasi; 3. Dirjen Percepatan PDT; 4. Dirjen PPKT; beserta jajarannya.
7.	BMKG dan BNPP (BASARNAS)	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023.	- RDP dilaksanakan pada tanggal 07 September 2022 pukul 10.00 - 13.00 secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh 1. SESTAMA BMKG; 2. SESTAMA BNPP (BASARNAS); beserta jajarannya.
8.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022;	- RDP dilaksanakan pada tanggal 07 September 2022 pukul 14.00

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023. - Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 	<ul style="list-style-type: none"> - selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen; 2. Dirjen Perhubungan Darat; 3. Dirjen Perkeretaapian; 4. Kabalai Pengelolaan Transportasi Darat (virtual) 5. Kabalai Teknik Perkeretaapian (virtual) beserta jajaran.
9.	MITRA KERJA KOMISI V DPR RI : KEMENPUPR, KEMENHUB, KEMENDESA PDTT, BMKG dan BNPP (BASARNAS)	RAKER DAN RDP (Terbuka)	Penetapan hasil pembahasan RKA K/L TA. 2023 Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023.	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 08 September 2022 pukul 10.00 - selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri PIPR (virtual); 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Desa PDTT; 4. Kepala BMKG; 5. Kepala BNPP (BASARNAS). beserta jajaran.
10.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	Membahas pengelolaan bandara oleh Badan Usaha Bandar Udara serta permasalahannya.	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 pukul 10.00 - selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen HubUd; 2. Dirut PT AP I dan PT AP II; beserta stakeholders lainnya.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
11.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN dan PUPR	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	Membahas terkait kecelakaan kendaraan di perlintasan sebidang jalur kereta api.	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 pukul 10.00 - 13.00 secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Perkeretaapian; 2. Dirjen Bina Marga; 3. Dirut KAI; 4. Dirut KCI 5. Kakorlantas POLRI; beserta <i>stakeholders</i> lainnya.
12.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	RAPAT DENGAR PENDAPAT (Terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas jaringan jalan tol seluruh Indonesia. - Rencana pembangunan jalan tol di sejumlah daerah. - Pengembangan teknologi fasilitas jalan Tol. - Pemenuhan SPM jalan Tol, serta kendala yang dihadapi. 	<ul style="list-style-type: none"> - RDP dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 pukul 14.00 - selesai secara Fisik dan Virtual. - Dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Bina Marga; 2. Kepala BPJT; beserta jajarannya.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KEMENTERIAN PUPR	KUNJUNGAN SPESIFIK	Kunjungan Kerja ke : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi abrasi pantai dan penanganan banjir air serta infrastruktur jalan di Bengkulu. - Lokasi rencana 	Kunsfik dilaksanakan tanggal 2-4 September 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pembangunan dan melihat kondisi infrastruktur kampus ITERA di Lampung. - Lokasi rencana percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.	
2.	KEMENTERIAN PUPR dan PERHUBUNGAN	KUNJUNGAN SPESIFIK	Kunjungan Kerja ke : - Lokasi Pembangunan Bendungan Cipanas Kab. Sumedang, Jabar. - Lokasi Reahabilitasi UPPKB (Jembatan Timbang) Cimanuk Pandeglang, Banten. - Lokasi Rehabilitasi PAU ITB, Bandung, Jabar.	Kunsfik dilaksanakan tanggal 9-11 September 2022.
3.	DPRD PROVINSI MALUKU	-	RDPU (Audiensi) dengan DPRD Prov. Maluku membahas upaya pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku.	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 secara Fisik.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Konsinyering dengan Eselon I Kementerian BUMN RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Pembahasan mengenai RKA Kementerian BUMN TA 2023 per eselon I.	Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja.
2.	Konsinyering dengan Eselon I Badan Standardisasi Nasional	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Pembahasan mengenai RKA Badan Standardisasi Nasional TA 2023 per eselon I.	Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja.
3	Konsinyering dengan Eselon I Komisi Pengawas Persaingan Usaha	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara c. Kebijakan Pemerintah.	Pembahasan mengenai RKA Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023 per eselon I.	Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja.
4	Konsinyering dengan Eselon I BP Batam	a. Pelaksanaan undang-undang;	Pembahasan mengenai RKA BP Batam TA 2023 per eselon I.	Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.		
5	Konsinyering dengan Eselon I BPKS Sabang	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Pembahasan mengenai RKA BPKS Sabang TA 2023 per eselon I.	Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja.
6	Konsinyering dengan Eselon I Kementerian Investasi/BKPM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Pembahasan mengenai RKA Kementerian Investasi/BKPM RI TA 2023 per eselon I.	Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja.
7	Konsinyering dengan Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Pembahasan mengenai RKA Kementerian Koperasi dan UKM RI TA 2023 per eselon I.	Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja.
8	Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pendalaman Pembahasan mengenai RKA Kementerian Perdagangan TA 2023. b. Pelaksanaan Anggaran TA 2022 c. Program dan Evaluasi pelaksanaan BPUM.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			d. Progres peyaluran dana bergulir TA 2022 dan rencana TA 2023. e. Proses penanganan koperasi bermasalah.	
9	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pembahasan RKA K/L TA 2023 b. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2022.	
10	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pembahasan RKA K/L TA 2023. b. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2022.	
11	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BP Batam	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pembahasan RKA K/L TA 2023. b. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2022.	
12	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKS Sabang	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pembahasan RKA K/L TA 2023. b. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2022.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
13	Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, penerima PMN 2023	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pembahasan RKA K/L TA 2023 serta tambahan PMN 2022. b. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2022. c. Kinerja keuangan BUMN terutama yang berdampak utang luar negeri.	
14	Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/BKPM RI	a. Pelaksanaan undang-undang b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pembahasan RKA K/L TA 2023. b. <i>Progress</i> investasi tahun 2021 dan 2022. c. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2022.	
15	RDP dengan BUMN Perbankan, PT BRI Persero Tbk	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Pembahasan kinerja korporasi dan RKP TA 2022. b. Evaluasi pelaksanaan program PEN dalam program relaksasi kredit perbankan.	
16	RDP dengan BUMN Perbankan, PT Bank Mandiri Persero Tbk	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Pembahasan kinerja korporasi dan RKP TA 2022. b. Evaluasi pelaksanaan program PEN dalam program relaksasi kredit perbankan.	
17	RDP dengan BUMN Perbankan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara;	a. Pembahasan kinerja korporasi dan RKP TA 2022.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah.	b. Evaluasi pelaksanaan program PEN dalam program relaksasi kredit perbankan.	
18	RDP dengan BUMN Perbankan, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Pembahasan kinerja korporasi dan RKP TA 2022. b. Evaluasi pelaksanaan program PEN dalam program relaksasi kredit perbankan.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. PT Barata Indonesia (Persero), b. Perum Perindo, c. PT Berdikari (Persero) dan d. PT Garam	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Kinerja Perusahaan PT Barata Indonesia (Persero), Perum Perindo, PT Berdikari (Persero) dan PT Garam.	
2.	Direktur Utama PT Pertamina (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Pembahasan mengenai produksi atau <i>lifting</i> minyak. b. Pengolahan minyak dan kapasitas kilang minyak c. Subsidi bahan bakar minyak (BBM).	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	RDP Panja BUMN Energi dengan Direktur utama PT Inalum (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. <i>Progress Indonesia bateray Corp (EV Battery)</i> b. Program hilirisasi minerba (<i>progress proyek smelter</i>).	
4.	RDP Panja BUMN Energi dengan Direktur utama PT Antam Tbk	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. <i>Progress Indonesia bateray Corp (EV Battery)</i> b. Program hilirisasi minerba (<i>progress proyek smelter</i>)	
5	RDP Panja BUMN Energi dengan Direktur utama PT Freeport Indonesia	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. <i>Progress Indonesia bateray Corp (EV Battery)</i> b. Program hilirisasi minerba (<i>progress proyek smelter</i>)	
6	RDP dengan Direktur Taspen	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Pembahasan mengenai kinerja perusahaan.	
7	RDP dengan Direktur Utama Garuda Indonesia	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	<i>Progress penyelamatan Garuda Indonesia pasca PKPU sesuai skema yang sudah ditetapkan.</i>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Eselon I Kementerian Perindustrian RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2023.	
2.	Menteri Perindustrian RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Penetapan RKA-K/L TA. 2023.	Disampaikan ke Badan Anggaran.
3.	Eselon I Kementerian ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2023.	
4.	Kepala BRIN, Kepala BIG dan Kepala BAPETEN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2023; b. Penetapan RKA-K/L.	Disampaikan ke Badan Anggaran khusus BIG dan BAPETEN.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Menteri ESDM 2021	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2023 dilanjutkan penetapan; b. Penetapan RKA-K/L TA. 2023.	Disampaikan ke Badan Anggaran.
6.	Kepala BRIN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Melanjutkan Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2023; b. Penetapan RKA-K/L.	
7.	Menteri ESDM 2021	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Pembahasan penyesuaian Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2023 dilanjutkan penetapan.	Disampaikan ke Badan Anggaran.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Sekjen dan Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI b. Gubernur Sulawesi Selatan c. Gubernur Sulawesi Tenggara d. Gubernur Sulawesi Tengah	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Realisasi kontribusi PT Vale Indonesia, Tbk., terhadap Pendapatan Negara dan daerah. b. Penjelasan terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Vale	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Indonesia, Tbk., dalam Kontrak Karya termasuk Kontrak Karya Amendemen.	
2.	Parlemen Finlandia	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	<i>Courtesy call.</i>	
3.	Sekjen dan Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan menghadirkan Dirut Perusahaan Smekter Nikel, yaitu: a. PT ANTAM, Tbk. b. PT Vale Indonesia, Tbk. c. PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara d. PT Wana Tiara Persada e. PT Weda Bay Nickel	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Penjelasan terkait Penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel b. Penjelasan Rencana produksi dan pasokan nikel untuk smelter c. Progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral logam.	
4.	Sekjen dan Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan menghadirkan dirut perusahaan tambang Nikel ore, yaitu: a. PT ANTAM, Tbk. b. PT Vale Indonesia, Tbk.	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Penjelasan rencana produksi tambang nikel ore. b. penjelasan terkait illegal mining nikel Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	c. PT Sulawesi Cahaya Mineral d. PT Trimegah Bangun Persada e. PT Karyatama Konawe Utara f. PT Gane Permai Sentosa g. PT Ceria Nugraha Indotama		c. Progress fasilitas pengolahan dan permurnian (smelter) Nikel yang sedang dibangun PT <i>CNI Group</i> .	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pertamina (Persero) MOR VI Balikpapan dan PT Kedap Sayang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.	
6.	Sekjen dan Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan menghadirkan dirut perusahaan tambang batubara, yaitu: a. PT Kaltim Prima Coal (KPC) b. PT Adaro Indonesia c. PT Borneo Indobara d. PT Ideco Jaya Agung e. PT Berau Coal f. PT Arutmin Indonesia g. PT Bara Tabang h. PT Antang Gunung Ratus	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Penjelasan produksi Tahun 2021-2022. b. Progres Pemenuhan DMO batubara.	
6.	Dirjen Industri Agro Kemenperin RI dengan	a. Pelaksanaan undang-undang;	Pemenuhan kebutuhan minyak goreng bagi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	menghadirkan: a. Dirut PT Wilmar Group b. Dirut PT Smart, Tbk. c. dan 8 dirut Perusahaan besar	b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	masyarakat (menyampaikan detail produksi dan penyaluran CPO serta minyak goreng serta luas wilayah yang dikelola.	
7.	Direktur Utama PT PLN (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Penjelasan teknis terkait program kompor induksi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Rapat Internal Panja RUU Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Komisi VIII DPR RI mendorong RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masuk ke dalam RUU Prioritas Tahun 2022-2023. 2. Panja menyepakati pendalaman beberapa pengaturan pokok RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, antara lain pengaturan batas usia lanjut usia, bentuk pelayananan sosial/kesehatan, pemenuhan hak lanjut usia, kewajiban keluarga menyejahterakan orang tua, partisipasi masyarakat melalui lembaga, pekerja sosial dalam memberi layanan kepada lanjut usia, tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Panja Komisi VIII DPR RI bersepakat agar draf RUU dan Naskah Akademik mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi RUU Inisiatif Komisi VIII DPR RI dan selanjutnya dikirim ke Badan Legislatif untuk dilakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi. 	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama (Kemenag) RI	Rapat Kerja dengan Menteri Agama dan Rapat Dengar Pendapat dengan para Pejabat Eselon I Kemenag mengenai RKA K/L Tahun 2023.	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Agama RI tahun 2023 sebesar Rp70.446.036.880.000,- (<i>tujuh puluh triliun empat ratus empat puluh enam miliar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah</i>).	-
2.	Kementerian Sosial (Kemensos) RI	Rapat Kerja dengan Menteri Sosial dan Rapat Dengar Pendapat dengan para Pejabat Eselon I Kemensos mengenai RKA K/L Tahun 2023.	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.179.586.686.000,- (<i>Tujuh Puluh Delapan Triliun Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah</i>).	
3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Rapat Kerja dengan Menteri PPPA dan Rapat Dengar Pendapat dengan para Pejabat Eselon I Kementerian	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Perlindungan Anak (KPPA) RI	PPPA mengenai RKA K/L Tahun 2023.	Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.288.403.485.000 (<i>Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah</i>).	
4.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Rapat Kerja dengan Kepala BNPB dan Rapat Dengar Pendapat dengan para Deputi BNPB mengenai RKA K/L Tahun 2023.	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran BNPB Tahun Anggaran 2023 setelah mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.42.000.000.000 (<i>Empat Puluh Dua Miliar</i>) menjadi sebesar Rp1.036.186.769.000 (<i>Satu Triliun Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah</i>).	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.	Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M dengan laporan keuangan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat Dan Makanan	Tanggal 12-18 September 2022. Kunjungan Luar Negeri RUU tentang Pengawasan Obat Dan Makanan ke Negara Italia dan Belanda.	Mendapat masukan serta perbandingan pelaksanaan pengawasan dan perizinan terhadap obat makanan di Italia dan Belanda.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepala Badan BP2MI	Rapat dengar Pendapat tanggal 31 Agustus 2022. Pembahasan RKA-K/L Tahun 2023.	Rapat bersifat tertutup.	
2.	Kepala Badan POM RI	Rapat dengar Pendapat tanggal 31 Agustus 2022. 1. Pembahasan RKA-K/L Tahun 2023.	Rapat bersifat tertutup.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.		
3.	Kepala BKKBN	Rapat dengar Pendapat tanggal 1 September 2022. 1. Pembahasan RKA-K/L Tahun 2023. 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	Rapat Bersifat Tertutup.	
4.	Menteri Ketenagakerjaan RI	Rapat Kerja tanggal 1 September 2022, Pembahasan RKA-K/L Tahun 2023.	Rapat Bersifat Tertutup.	
5.	Menteri Kesehatan RI	Rapat Kerja tanggal 5 September 2022, 1. Pembahasan RKA-K/L Tahun 2023. 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	Rapat Bersifat Tertutup.	
6.	Pejabat Eselon I BP2MI	Rapat dengar Pendapat tanggal 6 September 2022, Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.	Rapat Bersifat Tertutup.	
7.	Pejabat Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI	Rapat dengar Pendapat tanggal 6 September 2022, Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.	Rapat Bersifat Tertutup.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	Pejabat Eselon I BKKBN	Rapat dengar Pendapat tanggal 7 September 2022, Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.	Rapat Bersifat Tertutup.	
9.	Pejabat Eselon I Badan POM	Rapat dengar Pendapat tanggal 7 September 2022, Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.	Rapat Bersifat Tertutup.	
10.	Pejabat Eselon I BP2MI	Rapat dengar Pendapat tanggal 8 September 2022, Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.	Rapat Bersifat Tertutup.	
11.	Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan RI	Rapat dengar Pendapat tanggal 8 September 2022, Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.	Rapat Bersifat Tertutup.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik	Tanggal 2 - 4 September 2022.	Komisi IX DPR RI secara umum mengapresiasi capaian vaksinasi untuk dosis 1 dan 2, selanjutnya terus meningkatkan capaian vaksinasi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Pengawasan tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 ke: 1. Provinsi Lampung; 2. Provinsi DI Yogyakarta; 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat.	<i>booster</i> dengan tetap menjaga kualitas vaksin serta pemantauan terhadap KIPI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU Kepariwisataan	<p>12-14 September 2022 Kunjungan Kerja Panja RUU Kepariwisataan, untuk mencari masukan penyempurnaan draf RUU ke tiga daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi Superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. 2. Destinasi Pariwisata Superprioritas Danau Toba, Sumatera Utara 3. Destinasi Superprioritas Mandalika, NTB. 	<p>Masukan Pemangku Kepentingan destinasi pariwisata Superprioritas Labuan bajo antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya substansi pengaturan agar tidak terjadi monopoli usaha bidang pariwisata. 2. Perlunya substansi pengaturan agar pembangunan destinasi pariwisata, khususnya destinasi pariwisata superprioritas memiliki dampak positif ke masyarakat sekitar dan pengusaha lokal, khususnya dalam hal pengembangan SDM tenaga kerja, pelaku ekraf dan pelaku usaha di daerah 3. Revisi UU Kepariwisataan harus di lakukan sinkronisasi dengan beberapa UU terkait, antara lain UU Pemda, UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda. 	Laporan lengkap masih dalam proses penyusunan.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Masukan Pemangku Kepentingan Destinasi Superprioritas Danau Toba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar lokasi destinasi wisata belum memiliki TIC (<i>Tourism Information Center</i>). Maka pemangku pariwisata di DSP Danau Toba mendorong agar Pemerintah membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi di setiap destinasi strategis pariwisata untuk memudahkan informasi pariwisata kepada wisatawan dan pemangku kepentingan. 2. Pemangku pariwisata mendorong agar RUU Kepariwisata yang sedang disusun agar dapat lebih melibatkan kabupaten/kota mengingat dalam RUU yang baru pembangunan Desa Wisata dan Tematik akan menjadi bagian UU yang baru. Karena dalam 10 tahun terakhir koordinasi kementerian pariwisata difokuskan dengan pemerintah provinsi 3. Perlu juga dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Pariwisata Tingkat Pusat, Provinsi dan daerah yang bersifat lintas sektoral sehingga 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pembangunan kepariwisataan lebih terintegrasi.</p> <p>4. Keberadaan Destinasi Super Prioritas Danau Toba tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur, tapi juga perlu diimbangi dengan dukungan peningkatan SDM kepariwisataan. Maka pemangku pariwisata meminta agar kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Kawasan Danau Toba perlu didukung berupa pembangunan SMK Pariwisata dan perguruan tinggi pariwisata.</p> <p>5. Pemangku pariwisata daerah meminta agar pendanaan pariwisata kiranya desentralisasikan lebih besar ke daerah mengingat pariwisata merupakan industri dan jasa yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Pembenahan sarana dan prasarana, kelembagaan, industri dan usaha kreatif, promosi dan pemasaran merupakan <i>key success factor</i> yang perlu didanai bersama para pemangku kepentingan.</p> <p>6. Dalam pendanaan desa wisata dan desa tematik koordinasi dan sistem</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pendanaannya perlu diselaraskan antar tingkatan pemerintah dan lintas bidang</p> <p>Masukan Pemangku Kepentingan Destinasi Superprioritas Mandalika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUU Kepariwisata harus mempertimbangkan dicantumkannya Pengaturan Destinasi Super Prioritas agar progres dan pengembangannya berkelanjutan, tidak hanya program dalam satu masa pemerintahan saja. 2. Pengembangan keilmuan pariwisata hendaknya dapat didorong dengan RUU Kepariwisata, karena kebijakan Kemendikbudristek RI saat ini menitikberatkan pada Ilmu STEM. Pendidikan bidang pariwisata saat ini hanya terbatas pada peningkatan SDM dengan program vokasi, sedangkan penelitian, perkembangan dan perencanaan pariwisata dihasilkan dengan pendidikan akademik yang untuk mengajukan program studinya saja tidak dibuka. 3. Pengaturan mengenai digitalisasi wisata termasuk aplikasi layanan 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			travel secara <i>online</i> (daring) perlu dibuat sedemikian rupa agar dapat memihak kepada industri dalam negeri. Temuan di lapangan ditemui wisatawan mancanegara yg datang ke Indonesia melalui aplikasi daring milik agensi luar negeri, industri dalam negeri hanya menerima pesanan dari agensi tersebut.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perpustakaan Nasional RI	RDP 31 Agustus 2022 1. Membahas RKA-K/L Tahun 2023. 2. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi	1. Perpustakaan RI menyampaikan pagu anggaran berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp.723.040.156.000 (<i>Tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah</i>). 2. Perpustakaan RI menyampaikan dana dekonsentrasi sebesar Rp12.212.092.000 (<i>Dua belas miliar dua ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah</i>), dengan target 33 perpustakaan Provinsi untuk pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, <i>workshop</i> pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah. 3. Perpustakaan RI menyampaikan pagu DAK fisik Penugasan sub Bidang Perpustakaan TA	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2023 sebesar Rp525.000.000.000 (<i>Lima ratus dua puluh lima miliar rupiah</i>).	
2.		RDP 2 September 2022 Membahas RKAKL Tahun 2023	Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp.723.040.156.000 (<i>Tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah</i>).	
3.	Kemenparekraf/ Baparekraf RI	Raker 31 Agustus 2022 1. Membahas RKA-K/L Tahun 2023. 2. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi	1. Menparekraf/Kepala Baparekraf RI menyampaikan bahwa berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2023, pagu anggaran/ sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI sebesar Rp3.381.345.168.000 (<i>Tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>). 2. Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4.186.990.000.000 (<i>Empat triliun seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah</i>), dengan rincian awal usulan I sebesar Rp 952.096.897.000,00 (<i>Sembilan ratus lima puluh dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>), dan usulan II sebesar Rp3.234.893.103.000 (<i>Tiga triliun dua ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus</i>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah).</i>	
4.		Raker 8 September 2022 Membahas RKA-K/L Tahun 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp3.381.345.168.000 (<i>Tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pagu Sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp4.186.990.000.000 (<i>Empat triliun seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah</i>). 3. Komisi X DPR RI akan menyampaikan Pagu Sementara/Anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI. 	
5.	Kemendikbudristek RI	Raker 8 September 2022 Membahas RKA-K/L Tahun 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kemendikbudristek RI RAPBN TA 2023 sebesar Rp.80.221.010.125.000 (<i>Delapan puluh triliun dua ratus dua puluh satu miliar sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan sebesar Rp10.145.822.090.000 (<i>Sepuluh triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sembilan puluh ribu rupiah), berdasarkan surat No.51423/MPK.A/PR.07.04/2022 tertanggal 4 Agustus 2022.	
6.	Kemenpora RI	Raker 1 September 2022 1. Membahas RKA-K/L Tahun 2023. 2. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi	1. Kemenpora RI menyampaikan alokasi Pagu Sementara pada RAPBN TA-2023 sebesar Rp2.530.093.157.000 (<i>Dua triliun lima ratus tiga puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>). 2. Kemenpora RI menyampaikan terdapat kenaikan Pagu sebesar Rp865.000.000.000 (<i>Delapan ratus enam puluh lima miliar rupiah</i>) dari Pagu Indikatif untuk kegiatan yang belum terdanai pada RAPBN TA 2023	
7.		Raker 8 September 2022 Membahas RKA-K/L Tahun 2023.	1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Sementara Kemenpora RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp2.530.093.157.000 (<i>Dua triliun lima ratus tiga puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI mendukung usulan tambahan untuk kegiatan yang belum terdanai pada tahun 2023 sebesar Rp1.423.450.000.000 (<i>Satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah</i>) sesuai surat Kemenpora RI Nomor 9.7.57 Tertanggal 7 September 2022 dengan catatan usulan rincian program akan dibahas kembali dengan Komisi X DPR RI	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran DPR RI.</p> <p>3. Komisi X DPR RI akan menyampaikan Pagu Sementara Kemenpora RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp2.530.093.157.000 (<i>Dua triliun lima ratus tiga puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan usulan tambahan sebesar Rp1.423.450.000.000 (<i>Satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah</i>) kepada Badan Anggaran DPR RI.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI/ SEKTOR	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemendikbudristek RI/ Pendidikan - Kebudayaan	<p>1 September 2022 RDPU Komisi X DPR RI bersama Pengurus PP HIMPAUDI.</p> <p>Agenda: Penyampaian aspirasi mengenai RUU Sisdiknas terkait status profesi guru.</p>	<p>PP HIMPAUDI Pusat dan Perwakilan HIMPAUDI Daerah menyampaikan masukan, aspirasi dan permasalahan penyusunan RUU Sisdiknas dengan beberapa poin di antaranya (1) RUU Sisdiknas memperkuat keberadaan Pendidikan usia dini dari sisi penguatan kelembagaan dan kesejahteraan guru, dan (2) mengusulkan perubahan frasa pada pasal-pasal di dalam RUU Sisdiknas.</p> <p>Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan</p>	

NO	INSTITUSI/ SEKTOR	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (K/L terkait) dalam agenda penyusunan RUU Sisdiknas.	
2.		<p>2 September 2022 RDPU Komisi X DPR RI bersama DPRD Kabupaten Manggarai (Komisi A).</p> <p>Agenda: Penyampaian aspirasi mengenai pengangkatan Guru PPPK.</p>	<p>Menyampaikan kondisi Kabupaten Manggarai masih kekurangan guru dan berdasarkan aspirasi Forum Guru yang telah lulus <i>Passing Grade</i> sebanyak 127 Guru PPPK, untuk itu meminta dukungan dari Komisi X DPR RI agar tetap ditempatkan di Kabupaten Manggarai.</p> <p>Komisi X DPR RI mendorong sinkronisasi data Dapodik dan Dukcapil di daerah untuk mempermudah Pemerintah Pusat dalam penempatan Guru PPPK agar dapat ditempatkan di Kabupaten Manggarai.</p>	
3.		<p>5 September 2022 RDPU Komisi X DPR RI bersama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PB PGRI 2. PP IGI 3. DPP PLKP 4. Poros Pelajar Nasional. 	<p>Para perwakilan organisasi menyampaikan aspirasi agar menunda pembahasan RUU Sisdiknas dan tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas RUU tahun 2022 karena substansinya belum menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru, tidak mengatur keberadaan lembaga kursus dan pelatihan, dan Tidak adanya klausul eksplisit yang menjamin adanya hak-hak pelajar/mahasiswa.</p>	

Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023
(31 Agustus – 14 September 2022)

NO	INSTITUSI/ SEKTOR	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Agenda Penyampaian aspirasi terkait RUU Sisdiknas dan dukungan penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan.	Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas harus melibatkan masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan transparansi dan legitimasi regulasi yang dihasilkan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah.	Tanggal 31 Agustus, pukul 10.00 WIB, Rapat Pleno Badan Legislasi.	Pengambilan Keputusan atas hasil Harmonisasi.	
3.	1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya di Provinsi Sulawesi Tengah; 2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi di Provinsi Sulawesi Tengah; 3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mountong di Provinsi Sulawesi Tengah.	Tanggal 1 September 2022, pukul 13.00 WIB, Rapat Pleno Badan Legislasi.	Mendengarkan penjelasan pengusul.	
4.	---	Tanggal 6 September 2022, pukul 15.00 WIB, Rapat Panja Badan Legislasi.	Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.	
5.	---	Tanggal 7 September 2022, pukul 10.00 WIB, Rapat Pleno Badan Legislasi.	Menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	Tanggal 13 September 2022, pukul 13.00 WIB, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi.	RDPU dengan PT Mandiri Graha Persada, PT Jaddi Internasional, PT Asti Dama Adhimukti, dan PT Bali Hai Brewery Indonesia dalam rangka Penyusunan RUU.	
7.		Tanggal 14 September 2022, pukul 10.00 WIB, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi.	RDPU dengan Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman (APIDMI), <i>Indonesia Spirits and Wine Asosiation</i> (ISWA), Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APMBI), Forum Komunikasi Pedagang Minuman Beralkohol Seluruh Indonesia (FKPMBSI) dalam rangka Penyusunan RUU.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Azerbaijan.	<p>GKSB DPR RI- Parlemen Azerbaijan menggelar rapat internal ke 3 guna membahas program kerja dan rencana kunjungan ke Baku, Azerbaijan. Rapat berlangsung secara tertutup di Ruang BKSAP, Nusantara III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (1/8/2022).</p> <p>Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan, Muhammad Iqbal, SE., M.Com (F-PPP) dan dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Azerbaijan Yulian Gunhar, SH., MH (F-PDIP), H. Abidin Fikri, SH., MH (F-PDIP), Dra. Hj. Elva Hartati, S.IP., MM (F-PDIP), Bobby Adhityo Rizaldi, SE., Ak. MBA., CFE (F-PG), Linda Megawati, SE., M.Si (F-PD).</p> <p>Dalam Rapat tersebut juga disepakati untuk mengatur jadwal kunjungan pada bulan Oktober 2022. Selain mengagendakan pertemuan dengan Parlemen Azerbaijan GKSB juga merencanakan kunjungan ke perusahaan minyak dan gas bumi Azerbaijan (SOCAR) dan juga kunjungan ke Universitas Bahasa di Azerbaijan.</p>	1 September 2022
2.	KSB - BKSAP	<i>BKSAP SDGs Day</i> UNSOED Purwokerto.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar <i>BKSAP G's Day</i> yang bertajuk “Optimalisasi Diplomasi <i>Soft Power</i> Parlemen Melalui Dunia Pendidikan dan Pertukaran Budaya” di Universitas	2 September 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah (2/9/2022).</p> <p>Memimpin kegiatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS) menyampaikan bahwa <i>BKSAP Day</i> bertujuan untuk mendekatkan DPR RI dengan kampus melalui kegiatan sosialisasi peran parlemen dalam menjalankan peran <i>second track diplomacy</i>.</p> <p><i>BKSAP SDG's Day</i> diikuti oleh sejumlah mahasiswa-mahasiswi dan jajaran Rektorat/Dekanat Unsoed. Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakil Ketua BKSAP Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin (F-PG), yang didampingi secara langsung oleh Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr selaku Rektor Unsoed.</p> <p>Sejumlah hal mengemuka dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa antara lain terkait peran DPR dalam diplomasi parlemen di tingkat dunia, diplomasi lingkungan, serta peran anggota parlemen muda dan anggota parlemen perempuan di kancah internasional. Diharapkan kegiatan ini dapat menjembatani kampus dengan DPR maupun pemerintah, sehingga terbuka berbagai kesempatan kerja sama/ peluang bagi mahasiswa maupun masyarakat.</p>	
3.	BKSAP	<i>P20 Fun Ride and Run</i>	Dalam rangka menjelang <i>The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit</i> (P20) DPR RI melaksanakan	4 September 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kegiatan sosialisasi dengan kegiatan <i>Friendship Ride and Run</i> pada tanggal 4 September 2022 di Gedung DPR RI.</p> <p>Rangkaian kegiatan ini merupakan aktivitas olahraga lari sejauh 3km dan 7km serta sepeda sejauh 17 km yang diikuti oleh peserta umum, komunitas, dan juga perwakilan dari Organisasi Internasional yang bekerja sama dengan BKSAP DPR RI. Pimpinan BKSAP Gilang Dhielafararez dan Anggota BKSAP Kamrussamad juga turut serta dalam <i>fun run</i> 7km.</p> <p>Diharapkan melalui kegiatan sosalisasi ini pihak-pihak terkait dapat turut serta membantu menyukseskan kegiatan <i>Parliamentary 20</i> (P20) yang akan berlangsung pada 5-7 Oktober mendatang.</p>	
4.	KSI - BKSAP	Wakil Ketua BKSAP, Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Anggota BKSAP, Vara Sarundajang (F-PDIP) mendampingi Ketua DPR RI untuk menghadiri <i>14th Summit of Women Speakers of Parliament</i> (14SWSP) di Tashkent, Uzbekistan	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Anggota BKSAP DPR RI, Charles Honoris (F-PDIP) dan Vara Sarundajang (F-PDIP) mendampingi Ketua DPR RI untuk menghadiri <i>14th Summit of Women Speakers of Parliament</i> (14SWSP) di Tashkent, Uzbekistan.</p> <p>KTT Ketua Parlemen Perempuan merupakan forum di IPU yang mewadahi ketua parlemen wanita di dunia. <i>IPU Summit of Women Speakers of Parliament</i> juga menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan jumlah perempuan yang menjabat sebagai ketua parlemen.</p>	6 – 12 September 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Adapun tema yang dibahas dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan dunia itu adalah 'Mencegah risiko dari teknologi serta melestarikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di dunia teknologi tinggi'.</p> <p>Melalui kesempatan ini Ketua DPR RI menyampaikan pentingnya peningkatan pembangunan infrastruktur internet di setiap negara. Selain itu, setiap negara harus memastikan keterjangkauan akses internet, memberdayakan pengguna, dan mengatasi kesenjangan gender dalam akses internet serta mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pengembangan teknologi.</p>	
5.	ABA - BKSAP	Kunjungan ke Pekanbaru dalam Rangka Rencana Pembentukan Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Melayu-Indonesia	<p>BKSAP melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru Riau, Selasa (6/9), dalam kerangka rencana pembentukan Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Melayu-Indonesia. Delegasi dipimpin Dr. Fadli Zon dengan anggota Dr. Mardani Ali Sera dan Irine Yusiana Roba Putri.</p> <p>Di Pekanbaru Delegasi BKSAP mengelat Diskusi Kelompok Terpumpun dengan pihak Pemprov Riau, Balai Bahasa Riau, kelompok adat dan masyarakat Riau, dan akademisi.</p> <p>Usai memaparkan secara singkat fungsi diplomasi yang dijalankan BKSAP, Fadli Zon menjelaskan bahwa</p>	6 September 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>ide pembentukan asosiasi ini lantaran secara faktual jumlah penutur Bahasa Melayu termasuk di dalamnya Bahasa Indonesia sekitar 300 juta orang yang sudah layak menjadi bahasa komunikasi global (Lingua Franca).</p> <p>Lebih lanjut Fadli yang juga merupakan Ketua BKSAP mengungkapkan setidaknya Bahasa Melayu-Indonesia dapat menjadi bahasa kerja forum parlemen ASEAN atau AIPA dimana tahun 2023 DPR akan menjadi ketua AIPA.</p> <p>Hal yang mengemuka pada diskusi di Pekanbaru adalah apakah yang dijadikan sandaran itu Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu dimana kedua bahasa tersebut memiliki muatan politik dan kekuasaan.</p> <p>Menyikapi perdebatan tersebut, BKSAP akan mematangkan konsep ide asosiasi lebih lanjut dengan mengajak para pakar terkait untuk bertukar pandangan.</p> <p>Secara umum, Provinsi Riau menyambut baik ide asosiasi ini dan Riau siap untuk menjadi sekretariat asosiasi serta memberikan dukungan substansi apabila asosiasi tersebut sudah terbentuk.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	KSB - BKSAP	<i>Working Lunch</i> Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Rusia	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menghadiri <i>Working Lunch</i> bersama Duta Besar Rusia untuk Indonesia (08/09/2022).</p> <p>Pimpinan BKSAP DPR RI yang terdiri dari Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) menghadiri <i>Working Lunch</i> dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Mrs. Lyudmila Vorobieva. Dalam <i>Working Lunch</i> tersebut dibahas rencana kehadiran delegasi Parlemen Rusia dalam ajang P20 yang akan diadakan di DPR RI.</p> <p>P20 diharapkan dapat menjadi forum negosiasi yang dapat berkontribusi untuk mencapai perdamaian antara Rusia - Ukraina dan stabilitas keamanan global.</p>	08 September 2022
7.	KSB - BKSAP	GKSB DPR RI – Parlemen Finlandia menerima Delegasi <i>Committe for the Future Eduskunta</i> (Parlemen Finlandia)	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) - DPR RI Parlemen Finlandia menerima delegasi <i>Committee for the Future Eduskunta</i> (Parlemen Finlandia) di Ruang Delegasi Nusantara 5 Lantai 2 (08/09/22).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Finlandia, Mercy Chriesty Barends (F-PDIP) menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran delegasi Parlemen Finlandia di DPR RI, yang menunjukkan komitmen kuat kedua pihak dalam menjaga dan memajukan hubungan bilateral</p>	08 September 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indonesia - Finlandia termasuk kerja sama antarpemerintah.</p> <p>Hubungan diplomatik Indonesia dan Finlandia telah terjalin sejak tahun 1954, didasari oleh kesamaan pandangan terhadap prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan <i>Sustainability</i>. Kedepannya kedua negara akan bekerja sama meningkatkan volume perdagangan bilateral antara Indonesia - Finlandia, energi terbarukan, pendidikan, penanggulangan dampak perubahan iklim dan pandemi, pembangunan berkelanjutan, serta ekonomi dan teknologi hijau.</p> <p>Ketua Delegasi <i>Committee for the Future</i>, Hon. Mr. Joakim Strand, berterima kasih atas penyambutan yang hangat oleh DPR RI dan mendukung Indonesia yang sedang memasuki proses transisi energi. Semangat tersebut juga dituangkan dalam tema keketuaan Indonesia di G20 yang mencakup pemulihan global yang inklusif, transisi energi, dan digitalisasi. Ketua Delegasi juga menyambut baik rencana kunjungan yang akan dilakukan oleh Komisi VII dan GKSB DPR RI-Parlemen Finlandia.</p> <p>Pertemuan juga dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Finlandia dan Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani (F-PPP), Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon (F-PDIP) dan Anggota Komisi VII sekaligus BKSAP, Dyah Roro Esti Widya Putri (F-PG).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP DPR RI dengan BKSP DPD RI	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota BKSP DPD RI (08/09/2022).</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) menerima Ketua BKSP DPD RI, Sylviana Murni, Wakil Ketua BKSP DPD RI Emma Yohana dan Anggota BKSP DPD RI, Abraham Lianto beserta Sekretariat BKSP DPD RI.</p> <p>Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi perkenalan antara badan kerja sama parlemen DPR RI dan DPD RI, sekaligus membuka komunikasi, berdialog dan berkoordinasi terkait diplomasi <i>multitrack</i> yang telah dilakukan oleh BKSAP DPR RI selama ini.</p>	08 September 2022
9.	BKSAP	Kuliah Umum Kampus Merdeka	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI mengisi kuliah umum bagi mahasiswa magang program Kampus Merdeka (12/09/2022).</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) mengisi kuliah umum tersebut dengan memberikan materi tentang tugas dan fungsi Diplomasi Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Program Kampus Merdeka dengan kegiatan Magang di Rumah Rakyat ini juga merupakan salah satu cara yang baik untuk memperkenalkan DPR RI kepada generasi muda terutama para</p>	12 September 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mahasiswa, agar mereka mengetahui betul tugas pokok dan fungsi DPR, tidak hanya membentuk undang-undang saja yang mungkin biasa mereka ketahui.</p> <p>DPR juga memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan Politik Luar Negeri. BKSAP DPR RI juga berkontribusi aktif pada forum internasional seperti <i>International Parliament Union (IPU)</i>, <i>ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)</i>, dan <i>Parliamentary Union of OIC Members (PUIC)</i>.</p>	
10.	KSB - BKSAP	Pimpinan BKSAP menerima Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Senat Perancis	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan, dan Angkatan Bersenjata Senat Perancis di Gedung Nusantara III Lt. 2.</p> <p>Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) mengapresiasi kehadiran Delegasi Senat Perancis dan upaya penguatan hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam bidang pertahanan yang ditandai dengan penandatanganan <i>Defense Cooperation Agreement (DCA)</i> oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dan Perancis. Kerja sama ini diharapkan memberi kontribusi besar penguatan hubungan pertahanan kedua negara dan stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.</p> <p>Gilang Dhielafararez (F-PDIP) selaku Wakil Ketua BKSAP dan Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Perancis menyampaikan</p>	13 September 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dukungannya terhadap upaya - upaya penguatan hubungan diplomatik antara kedua negara. GKSB DPR RI - Parlemen Perancis siap untuk menindaklanjuti berbagai <i>pending matters</i> antara kedua negara dalam berbagai bidang.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana (F-PD) mengapresiasi hubungan dagang Indonesia - Perancis selama ini dan mengharapkan dukungan Perancis pada kerangka kerja sama Indonesia - <i>European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (I-EU CEPA) guna meningkatkan perdagangan antara kedua negara dan membantu berbagai produk Indonesia untuk masuk ke pasar Perancis, termasuk Kelapa Sawit.</p> <p>Pimpinan BKSAP juga berharap dengan kehadiran Delegasi Perancis di P20 pada bulan Oktober dapat menjadi ajang diskusi yang produktif untuk membahas isu - isu penting seperti pemulihan pasca-pandemi, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, energi, dan ekonomi hijau.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Audiensi DPRD	Mahkamah Kehormatan Dewan menerima kunjungan dari DPRD Kutai Kertanegara tanggal 6 September 2022, DPRD Prov. Jawa Barat 9 September 2022.	
2.	Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting Mahkamah Kehormatan Dewan dilaksanakan di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal: <ol style="list-style-type: none">1. 7 s.d 9 September 2022 dalam rangka masukan terkait Kode Etik Sistem Pendukungnya (Tenaga Ahli dan Staff Administrasi) DPR RI, dengan mengundang Agus Yulianto, S.E., MM. sebagai narasumber.2. 12 s.d 14 September 2022 dalam rangka Masukan terkait Penyempurnaan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dengan mengundang Muh. Walid, S.H., M.H. sebagai narasumber.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	<p>Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selasa, 1 September 2022</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nota Penjelasan Sekjen tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2022. Nota Penjelasan Sekjen tentang RKA DPR RI Tahun 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp2.729.284.378.859,00 (<i>dua triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah</i>) atau 50,28% dari pagu sebesar Rp5.428.620.921.000,00 (<i>lima triliun empat ratus dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2023 berdasarkan Pagu Anggaran sebesar Rp5.859.497.483.000,00 (<i>lima triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah</i>). 	
2.	<p>Rapat Panja-Panja BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Rabu, 5 September 2022</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2022 Satker Dewan. 	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran Satuan Kerja Dewan sebesar Rp2.058.007.816.339,00 (<i>dua triliun lima puluh delapan miliar tujuh juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah</i>) atau 51,42% dari pagu sebesar Rp4.002.036.941.000,00 (<i>empat triliun dua miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>). 	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
	<p>2. Rapat Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2022 Satker Setjen.</p> <p>3. Rapat Panja RKA DPR RI Tahun 2023 Satker Dewan.</p> <p>4. Rapat Panja RKA DPR RI Tahun 2023 Satker Setjen.</p>	<p>2. Realisasi anggaran Satuan Kerja Setjen sebesar Rp671.276.562.520,00 (<i>enam ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah</i>) atau 47,05% dari pagu sebesar Rp1.426.583.980.000,00 (<i>satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Satker Dewan Rp4.329.514.670.000,00 (<i>empat triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Satker Setjen Rp1.529.982.813.000,00 (<i>satu triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah</i>).</p>	
3.	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BURT dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Senin, 5 September 2022 Agenda Program JHT untuk Pegawai di lingkungan Setjen DPR RI</p>	<p>Setjen DPR RI diminta mempelajari skema pembayaran premi JHT PPNASN pada institusi pemerintah yang lain, apakah dapat diterapkan untuk pegawai PPNASN di lingkungan Setjen DPR RI.</p>	
4.	<p>Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Selasa, 6 September 2022 Agenda Laporan Panja-Panja BURT</p>	<p>-----</p>	
5.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri: 1. Banten, 7-9 September 2022.</p>	<p>Peninjauan rumah sakit provider PT. Asuransi Jasindo dan ke kantor perwakilan PT. Asuransi</p>	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
	2. Bali, 13-16 September 2022	Jasindo di daerah dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.	
6.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, 7-9 September 2022.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di Bandara Kupang untuk: 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di bandara agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	1. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan terkait Pembicaraan Tk.I/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. 2. Pembacaan Laporan Panja Perumus Kesimpulan dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. 3. Pembacaan Pandangan Mini Fraksi sebagai sikap akhir Fraksi atas Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021.	Raker dilaksanakan pada hari Kamis, 1 September 2022, Pkl. 10.00 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.
2.			1. Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan. 2. Rapat Panja Membahas Penerimaan Negara Non Migas dan PNBK K/L. 3. Rekomendasi Rapat Panja <ol style="list-style-type: none"> a. Menyepakati target-target penerimaan negara Non migas dan PNBK K/L. Dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, Pemerintah perlu tetap realistis dalam 	Rapat Panja dilaksanakan pada hari Jumat, 2 September 2022 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menentukan setiap target yang hendak dicapai, selain itu tetap membangun sikap waspada dan mitigatif dalam menghadapi kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu.</p> <p>b. Target Penerimaan DJP disepakati naik sebesar Rp 2,9 triliun, semula Rp 1.715,1 triliun menjadi Rp 1718 triliun.</p> <p>c. Target Penerimaan Bea cukai disepakati naik sebesar Rp 1.4 triliun, semula Rp 301,8 triliun menjadi Rp 303.2 triliun.</p> <p>d. Target penerimaan Perpajakan APBN 2023 disepakati naik, semula Rp 2.016,9 triliun menjadi Rp 2021.2 triliun.</p> <p>e. Menyepakati kenaikan target PNBK Lainnya yang terdiri dari PNBK K/L, Penerimaan Hasil Tambang dan DMO Batubara sebesar Rp113,3 Triliun. Naik sebesar Rp2,9 Triliun dari target dalam RAPBN 2023.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan. 2. Rapat Panja Membahas PNBPN KND dan Pendapatan BLU. 3. Rekomendasi Rapat Panja <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan pengelolaan BUMN perlu terus dilakukan agar target Dividen BUMN menunjukkan peningkatan pencapaiannya setiap tahunnya. b. Menyepakati Target Penerimaan PNBPN sebesar Rp49,1 triliun atau naik Rp 5 triliun dari target dalam RAPBN 2023. c. Pemerintah harus mengutamakan peningkatan kualitas layanan dalam menjalankan kebijakan BLU karena banyak menyentuh pelayanan dasar seperti sektor kesehatan dan Pendidikan. d. Pemerintah agar membuat indikator pelayanan pada setiap pelayanan BLU. Indikator keberhasilan pelayanan ini menunjukkan peningkatan kualitas dan kemajuan pelayanan apa yang diterima oleh masyarakat dibanding tahun sebelumnya. Indikator pelayanan BLU yang dibuat harus menitikberatkan kepada kepuasan pelanggan atau penerima layanan 	<p>Rapat Panja dilaksanakan pada Rabu 7 September 2022 pukul 10.00 WIB WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>seperti kemudahan akses, ketepatan waktu dan kejelasan biaya pelayanan.</p> <p>e. Menyepakati target Penerimaan BLU sebesar Rp83 triliun.</p> <p>f. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola eksploitasi dan eksplorasi panas bumi agar penerimaan dari kegiatan eksploitasi dan eksplorasi bisa memenuhi target yang sudah ditentukan.</p> <p>g. Menyepakati target Penerimaan PNBP Non Migas sebesar Rp64,8 triliun.</p>	
4			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; 2. Rapat Panja Membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Indikator Pembangunan, Alokasi Subsidi, dan Pembiayaan; 3. Rekomendasi Rapat Panja: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyepakati Target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen; b. Menyepakati tingkat inflasi tahun 2023 menjadi 3,6 persen; c. Menyepakati target nilai tukar Rupiah dari Rp14.750 dalam NK RAPBN menjadi Rp14.800; d. Menyepakati nilai ICP sebesar US\$90 per barel, lifting minyak sebesar 660 	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 12 September 2022 pukul 10.00 WIB WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1.100 ribu barel setara minyak per hari;</p> <p>e. Menyepakati seluruh Sasaran Pembangunan dan Indikator Pembangunan yang disampaikan pemerintah mulai dari Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Nilai Tukar Petani, sampai dengan Nilai Tukar Nelayan sesuai dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2023;</p> <p>f. Menyepakati total Penerimaan PNBPD SDA Migas sebesar Rp 131,2 triliun;</p> <p>g. Menyepakati besaran Subsidi Energi sebesar Rp 212,0 yang terdisir dari Subsidi BBM Jenis Tertentu sebesar Rp 21,5 triliun dan Subsidi LPG tabung 3kg sebesar Rp 117,8;</p> <p>h. Menyepakati Volume Subsidi BBM Jenis tertentu sebesar 17,5 juta kiloliter yang terdiri dari Minyak Tanah sebesar 0,5 juta kiloliter dan Minyak Solar sebesar 17 juta kiloliter;</p> <p>i. Menyepakati Volumen Subsidi LPG tabung 3kg sebesar 8 juta metriks ton;</p> <p>j. Menyepakati Subsidi Tetap Minyak Solar sebesar Rp 1000/liter;</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>k. Menyepakati target defisit APBN TA 2023 sebesar 2,84% dari PDB;</p> <p>l. Menyepakati Pembiayaan Utang dalam RAPBN 2023 sebesar Rp 696.317,6 Miliar;</p> <p>m. Menyepakati Pembiayaan Non Utang sebesar (Rp98.166,3) miliar. Terdiri dari Pembiayaan Investasi sebesar (Rp 175.955,5) miliar, Pemberian Pinjaman sebesar Rp 5.284,8 miliar, Kewajiban Penjaminan sebesar (Rp 330,5) miliar, dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp 72.834,9 miliar.</p>	
5.	<p>1. Menteri Keuangan</p> <p>2. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI</p> <p>3. Gubernur Bank Indonesia</p>	<p>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</p> <p>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah.</p>	<p>1. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia mengenai Penetapan Postur Sementara RUU APBN TA 2023 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2023;</p> <p>2. Raker Menetapkan:</p> <p>a. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen;</p> <p>b. Inflasi tahun 2023 sebesar 3,6 persen;</p>	<p>Raker dilaksanakan pada hari Rabu, 14 September 2022, Pkl. 11.00 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. Nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.800/US; d. Suku Bunga SUN 10 tahun sebesar 7,9 persen; e. Harga Minyak Mentah Indonesia sebesar \$90/barel; f. <i>Lifting</i> Minyak sebesar 660 ribu barel per hari dan <i>lifting</i> gas sebesar 1.100 ribu barel setara minyak per hari; g. Target pertumbuhan dengan rincian: Tingkat Kemiskinan 7,5-8,5, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6,0, Gini Rasio 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,31-73,49, Nilai Tukar Petani 105-107, dan Nilai Tukar Nelayan 107-108; h. Penerimaan Negara sebesar Rp 2.463,0 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 2.021,2 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 441,4 triliun; i. Penerimaan Perpajakan senilai total Rp 2.021,2 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.718,0 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar RP 303,2 triliun; j. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 441,4 triliun terdiri dari Penerimaan SDA sebesar Rp 196,0 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>triliun, Pendapatan KND sebesar Rp 49,1 triliun, PNBP Lainnya sebesar 113,3 triliun dan Penerimaan BLU sebesar Rp 83,0 triliun;</p> <p>k. Subsidi Energi sebesar Rp 212,0 yang terdiri dari Subsidi BBM Jenis Tertentu sebesar Rp 21,5 triliun dan Subsidi LPG tahung 3kg sebesar Rp 117,8;</p> <p>l. Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 598,2 triliun rupiah;</p> <p>m. Defisit Anggaran sebesar (Rp 598,2) triliun dengan target persentase sebesar 2,84 persen dari PDB;</p> <p>n. Terdapat peningkatan Target Pendapatan Negara sebesar Rp 19,4 triliun dari RAPBN 2023 yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 4,3 triliun dan PNB p 15,1 triliun.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Provinsi Jawa Tengah, <i>selanjutnya melakukan pertemuan dengan</i> Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea Cukai, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Dirjen Bea Cukai, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, beserta Jajarannya, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Kepabeanan dan Cukai.	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 September 2022.
2.	Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta, <i>selanjutnya melakukan pertemuan dengan</i> Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Kepabeanan dan Cukai.	Kunjungan lapangan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022.
